



SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora

Jurnal Homepage: <http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sosio>

Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia

Fathullah Syahrul^{1)*}, Muh. Abdi Goning²⁾

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363

² Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar
Jalan. H.M. Yasin Limpo Nomor 36 Romangpolong-Gowa
Email: fathullah18001@mail.unpad.ac.id

Info artikel	Abstrak
<i>Article History</i>	<i>Kelompok militer sering terlibat dalam ranah sipil merupakan sebuah konsekuensi sejarah. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Tahun 2019, upaya kelompok-kelompok militer untuk mengisi jabatan sipil masih ada. 2) Agenda politik tahun 2019 menjadi fenomena dengan menguatnya isu Dwifungsi Militer hasil transformasi dari Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang telah lama hilang pasca runtuhnya orde baru. 3) masih ada masalah dalam internal institusi militer. 4) keterlibatan militer dalam jabatan sipil masih terkesan dipaksakan dan dianggap politis sebab menjadi bagian dari representasi proyek kepentingan politik.</i>
Naskah diterima: 6 Juli 2020	
Naskah direvisi: 19 Juli 2020	
Naskah disetujui: 20 Juli 2020	
<i>Kata kunci:</i>	
<i>Jabatan Sipil, Militer</i>	

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai keterlibatan militer dalam ranah sipil merupakan sebuah konsekuensi sejarah, sebab kelompok militer mengklaim bahwa mereka terlibat langsung dalam kemerdekaan Indonesia. Indonesia telah dipimpin sebanyak tujuh orang presiden, dua diantaranya adalah berasal dari kalangan militer. Hal ini menjadi satu bukti bahwa secara politik kalangan militer masih memiliki ambisi kekuasaan. Ambisi kekuasaan tersebut tidak lahir secara alami melainkan salah satu upaya untuk menebus jasa dalam meraih kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Geliat militer di Indonesia dalam gelanggang politik tidak terjadi secara alami, tetapi merupakan. Konsekuensi sejarah sejak lahirnya tentara Indonesia. Mentalitas umum tentara Indonesia sebelum maupun setelah kemerdekaan adalah peran langsungnya dalam perpolitikan. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, tentara terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan di mana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan (Crouch, 1999).

Ketika kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mendapat ancaman militer dari negara lain yang akan menemui kerugian bagi bangsa Indonesia, keutuhan wilayah, ketahanan dan keamanan negara terancam maka negara dapat menggunakan kekuatan militer. Sedangkan masalah-masalah yang saat ini dihadapi Indonesia adalah krisis yang kian jauh dari keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sehingga militer bukan solusinya. Meskipun pada dasarnya militer adalah klan budaya politik yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

Presiden merupakan jabatan politik, tetapi dua orang presiden Indonesia dari kalangan militer pernah menjabat sebagai seorang presiden. Ada dua pendapat tentang penolakan kelompok militer terlibat dan berperan dalam sosial politik. Pertama, peran sosial politik militer terlahir dalam keadaan perang atau keadaan darurat, sehingga untuk masa kini di mana kondisi darurat perang telah dilewati maka secara otomatis peran sosial politik akan hilang dengan sendirinya. Kedua, karena panduan

politik yang diajukan dalam melihat peran sosial politik adalah konsep *civilian supremacy*. Dalam konsep ini fungsi sosial politik militer akan berhadapan dengan demokrasi dan demokratisasi, karena diyakini budaya militer akan menghambat laju dari demokrasi yang tengah diupayakan (Mahdi dan Dinajani, 1998).

Munculnya militer di panggung politik, sosial dan ekonomi di negara-negara berkembang, berpangkal dari lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan unsur-unsur kehidupan masyarakat. Politisi sipil yang dengan relatif cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan suatu sistem politik yang sama sekali lepas dari kekuasaan asing, mengorganisir masyarakat yang relatif tergesa-gesa berhadapan dengan tuntutan modernisasi, masih mencoba model-model yang mungkin dipergunakan untuk melayani tuntutan-tuntutan masyarakat sendiri (Arbi Sanit, 2003).

Pada tahun 2019, mencuatnya isu-isu tentang pengisian pos-pos jabatan sipil oleh perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai polemik. Hal tersebut bermula saat Mayor Jenderal Sisriadi (Kasuspen TNI) memberikan pernyataannya bahwa ada kelebihan jumlah perwira menengah dan perwira tinggi. Akibatnya, banyak perwira tinggi dan menengah TNI tak dapat jabatan. Berdasarkan pernyataan Mayor Jenderal Sisriadi selaku Kasuspen TNI bahwa ada semacam upaya pemaksaan untuk memperjuangkan para perwira tinggi dan menengah TNI agar tetap mendapatkan jabatan.

Hal tersebut menuai banyak kritik, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mengkritik rencana pemerintah dalam merestrukturisasi TNI. Salah satu rencana restrukturisasi yang diwacanakan Joko Widodo adalah memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Direktur Imparsial, Al Araf menilai rencana tersebut tidak tepat. Alasannya, penempatan perwira TNI Aktif pada jabatan sipil dapat mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang berpijak pada doktrin dwifungsi ABRI dan mengganggu sistem pemerintahan yang demokratis (Erdianto, 2020).

Wacana penempatan perwira TNI di kementerian/lembaga sipil memicu perdebatan di kalangan publik. Koalisi Masyarakat Sipil di sektor keamanan menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat karena berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi ABRI, bertentangan dengan semangat reformasi. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan tersebut, wacana restrukturisasi TNI yang meliputi penempatan militer aktif ke jabatan-jabatan sipil di kementerian/lembaga. Adapun dalam rangka membuka peluang perluasan pos jabatan sipil oleh militer, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkap perlunya revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Fitri, 2019).

Dalam perspektif kebijakan fenomena tersebut sampai hari ini masih menjadi polemik. Kebijakan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan sipil menuai pro dan kontra di level masyarakat. Sebab, merebaknya isu-isu tersebut menjadi satu keprihatinan tersendiri bagi rakyat banyak. Karena isu tersebut seiring sejalan dengan mencuatnya tentang kembalinya Dwi Fungsi ABRI yang telah lama hilang pasca runtuhnya orde baru. Isu mengenai Dwi Fungsi ABRI ini marak kembali diperbincangkan setelah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan gagasan yang ingin menambah pos jabatan baru bagi perwira tinggi di internal maupun serta ke kementerian lainnya. Melalui itu, setidaknya ada lima masalah yang harus diidentifikasi.

Pertama, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dapat diungkap bahwa, proses penguatan masalah internal mestinya harus cepat diselesaikan oleh pihak TNI, khususnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Tentu dibutuhkan sebuah formulasi masalah dan identifikasi masalah terkait soal penguatan internal. Setidaknya hal yang mesti dibenahi ialah kualitas, pendidikan formal maupun non formal, strategi perang serta membentuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LITBANG) di TNI.

Kedua, akan ada tarik menarik kekuasaan antara pihak sipil dan TNI sehingga menimbulkan dualisme kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil, dan ini akan menjadi satu masalah yang solusinya akan rumit. Sebab, antara TNI dan sipil mereka memiliki tupoksi masing-masing.

Ketiga, para pihak TNI mestinya lebih memfokuskan dalam hal penyelesaian tentang ketahanan dan keamanan negara. Sebab, terasa ancaman baik datangnya dari dalam maupun dari luar datang silih berganti. Kita saksikan bagaimana hoaks merebak dimana-mana sudah tak terbandung lagi serta muncul kelompok-kelompok separatis yang meronrong dari dalam, tentu keterlibatan TNI dalam isu-isu seperti itu mestinya harus semakin produktif. Sebab, jika itu tak diperhatikan, perkelahian dan pertengkaran publik akan semakin tak terkontrol.

Keempat, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 47:

Prajurit Hanya Dapat Menduduki Jabatan Sipil Setelah Mengundurkan Diri Atau Pensiun Dari Dinas Keprajuritan. Prajurit Aktif Dapat Menduduki Jabatan Pada Kantor yang Membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung. Prajurit yang Menduduki Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Didasarkan Atas Permintaan Pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen Serta Tunduk Pada Ketentuan Administrasi yang Berlaku dalam Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen Dimaksud.

Dalam Undang-undang tersebut yang menjadi pegangan bagi TNI terkait soal penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil mestinya butuh tafsiran hukum yang baku terkait soal ayat-ayat aturan tersebut. Sebab, dalam ayat (1) terkesan berbenturan dengan ayat (2) dan (3). Itulah sebabnya, aturan ini mestinya butuh tafsiran hukum yang baku agar masyarakat mampu mengontrolnya.

Kelima, melalui polemik ini, ada kesan bahwa isu-isu ini dipaksakan atau ada upaya dominasi. Sebab, terasa jika aturan-aturan dan atau usulan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin kembalinya Dwi Fungsi ABRI akan terjadi. Di publik, tentu ini menjadi polemik karena hal itu sama sekali menciderai cita-cita reformasi atau orde paling baru (Syahrul, 2019).

Ini menyangkut kebijakan publik, (Dunn, 2000) mengungkapkan dalam pendekatan normatif bahwa TNI boleh saja mengisi jabatan sipil dengan catatan harus sesuai dengan backround atau knowledgenya (Dunn et al., 2000). Dikatakan dalam analisa konvergen bahwa jika meningkatnya TNI yang non job maka kapasitas dan kapabilitas TNI akan semakin dipertanyakan dalam hal ketahanan dan keamanan negara. Oleh sebab itu, mesti didorong semangat untuk menawarkan satu kebijakan yang produktif salah satunya adalah mengembangkan kapasitas TNI.

Terdapat banyak penelitian yang membahas tentang keterlibatan militer dalam jabatan sipil yang kemudian digagas melalui konsep relasi sipil dan militer. Salah satu literatur yang membahas hal tersebut ditulis oleh Nur Aliyah Zainal yang membahas tentang Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Auguste Pinochet 1990-2006. Dalam tulisannya tersebut, setelah mengamati pergolakan politik pasca kepemimpinan militer Auguste Pinochet 1990-2006, Nur Aliyah Zainal mengidentifikasi bentuk hubungan sipil-militer, bahwa proses subordinasi militer membawa pemerintahan sipil berhadapan dengan kepentingan lembaga militer itu sendiri. Militer akan tetap mempertahankan kepentingannya tersebut ketika berhadapan dengan kebijakan militer pemerintahan sipil jika dianggap tidak menguntungkan bagi lembaga tersebut, yang kemungkinan membawa militer untuk melakukan intervensi politik. Dijelaskan pulan, hubungan sipil-militer memerlukan waktu untuk menjadikannya “baik” dimana militer berada di wilayah profesionalnya. Proses yang terjadi di Chile menjadi contoh bagi negara-negara yang juga memiliki sejarah pernah diperintah oleh militer seperti halnya Indonesia. Pemerintahan sipil harus memiliki strategi untuk mengembalikan militer ke tugas yang seharusnya (Zainal, 2013).

Bahasan lain mengenai relasi sipil dan militer dibahas dalam artikel Koesnadi Kardi yang berjudul Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada era Reformasi di Indonesia. Dalam tulisannya, Koesnadi berusaha mengidentifikasi proses reformasi militer di Indonesia yang telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrin, maupun organisasional. Dari Identifikasi yang

ia lakukan, Koesnadi menemukan bahwa proses perubahan reformasi militer belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil-militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil-militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan dan inisiatif institusi sipil. Koesnadi mengungkapkan bahwa relasi sipil-militer pada era reformasi di Indonesia menunjukkan kohenrensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan “subordinasi sukarela” dari militer, dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer (Kardi, 2014).

Selain dua artikel diatas terdapat juga artikel dari Hary Ganjar Budiman yang berjudul Representasi Tentara dan Relasi Sipil-Militer Dalam Serial Patriot. Hary Ganjar Budiman berupaya untuk mengamati relasi sipil-militer dalam seri patriot, serial patriot dalam artikel tersebut dilihat sebagai media massa yang merefleksikan nilai atau norma dalam masyarakat. Serial patriot terlihat lebih didominasi oleh pihak militer, peran pemimpin sipil tidak nampak dalam patriot, pihak sipil digambarkan bergantung kepada pemimpin yang memiliki latar belakang tentara. Relasi sipil-militer dalam patriot memunculkan stratifikasi pembagian peran dan pengaruh diantaranya; relasi sipil militer yang lemah, pasif, nyaris tak memiliki pengaruh serta kekuatan (Budiman, 2018).

Ketiga literatur yang dipaparkan diatas secara umum memiliki kesamaan berupa upaya identifikasi relasi-sipil dan militer di Indonesia. Identifikasi tersebut berujung pada ditemukannya beberapa tipologi relasi sipil-militer. Meskipun sama-sama berfokus pada relasi sipil-militer sebagai tema besar, tulisan ini lebih berfokus untuk mengidentifikasi relasi sipil-militer yang dispesikasi pada keterlibatan militer dalam jabatan sipil tahun 2019.

Selain ketiga literatur diatas, terdapat juga literatur-literatur yang berupaya untuk mengamati relasi sipil-militer dalam perspektif kebijakan pertahanan. Salah satunya ialah penelitian dari Aditya Batara Gunawan yang mencoba untuk melihat kontrol sipil atas militer. Pada akhirnya, tulisan Gunawan berhasil mengidentifikasi bahwa upaya pemerintah sipil untuk mendorong kebijakan pertahanan di Indonesia pasca orde baru dilaksanakan melalui mekanisme *layering*. Secara teoritis, mekanisme *layering* beroperasi dalam kondisi-kondisi intitusional yang menjadi ciri khas dalam konteks transisi demokrasi yaitu besarnya jumlah *veto players* dalam proses pengambilan keputusan di arena politik dan kecilnya ruang diskresi kebijakan institusi yang dijadikan sebagai target perubahan (Gunawan, 2017).

Tulisan lain yang juga membahas tentang Relasi Sipil-Militer di Indonesia yang ditulis oleh David Setyawan dkk dengan judul Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil di Indonesia yang menjelaskan di Indonesia, gelombang reformasi juga berpartisipasi dalam ruang terbuka lebih besar untuk diskusi- hubungan sipil-militer yang terkait dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil-militer tidak hanya dibangun di atas doktrin militer, namun juga masyarakat sipil. Sehingga menjelaskan bahwa profesionalisme militer terdapat terjadi jika mereka ikut campur dalam politik. Pada awal tulisannya, David dkk menjelaskan relasi sipil-militer dengan menggunakan teori Huntington tanda membaca tentang militer dalam urusan sipil pada warga dengan teori ajensi. Teori ajensi menjelaskan bahwa hubungan sipil-militer terbagi menjadi dua bagian yaitu, kontrol sipil subyektif (*subjective civil control*) dan kontrol sipil obyektif (*objective civil control*). Pada bagian selanjutnya, David dkk berupaya mengidentifikasi sebuah upaya dalam membangun hubungan sipil-militer yang harmonis. Upaya untuk membangun format baru hubungan sipil-militer dalam masyarakat demokratis memerlukan landasan yang lebih fundamental. Prasyarat yang penting adalah pentingnya terbentuknya pemerintahan demokratis yang mencakup *rule of law*, akuntabilitas publik dalam kaitan *delicate balace* tentang otonomi militer (Setiawan, 2013).

Secara umum, literatur-literatur diatas dengan penelitian ini berupa kesamaan relasi sipil-militer di Indonesia sebagai tema sentral. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan-perbedaan yang cukup

jas dalam hal fokus pembahasan. Hampir semua literatur-literatur diatas mengkaji relasi sipil-militer di Indonesia dalam perseptif sejarah (*history*). Misalnya penelitian dari David Setiawan dkk yang menggunakan teori dari Huntington dalam melihat perkembangan hubungan sipil-militer Indonesia. Selain itu, penelitian dari Nur Aliyah Zaenal juga menggunakan perspektif sejarah (*history*) dalam rentang waktu pada tahun 1900-2006, ia melihat kondisi relasi sipil-militer di negara Chile kemudian diintegrasikan dengan fenomena relasi sipil-militer di Indonesia. Selain itu juga, penelitian dari Koesnasi Kardi yang membahas tentang relasi sipil-militer pasca reformasi dengan menganalisis fenomena orde baru kala Soeharto dari kelompok militer yang memimpin Indonesia selama 32 tahun lamanya.

Berbeda dengan literatur-literatur yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini lebih berfokus untuk mengamati bagaimana relasi sipil-militer pada tahun 2019, terdapat perkembangan yang cukup besar terkait relasi sipil-militer di Indonesia apalagi jika dikaitkan dengan fenomena politik yang melaju begitu deras di Indonesia. Sebab, jika kita membincang soal relasi sipil-militer di Indonesia tidak akan pernah lepas dari iklim politik yang berlaku. Tahun 2019 adalah momentum yang paling menarik untuk menjelaskan tentang relasi sipil-militer, sebab pada momentum tersebut memunculkan sebuah upaya dari kelompok-kelompok sipil yang ingin terlibat jauh dalam ikut mengintervensi jabatan-jabatan sipil.

METODE

Metode penelitian in menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki melalui gambaran atau melukiskan subjek atau objek terhadap fenomena sosial berdasarkan gejala-gejalanya (Nawawi, 2019). Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi tentang bagaimana keterlibatan militer dalam jabatan sipil dalam rentang waktu tahun 2019. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini mengelaborasi tinjauan sejarah (*history*) dan fenomena yang terjadi pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data kajian literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif tersebut meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika politik yang terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia tak pernah luput dari peran kelompok-kelompok militer. Sebab, militer merupakan kelompok-kelompok yang menurut perspektif sejarah terlibat aktif dalam proses peraihan kemerdekaan suatu negara. Pada tahun 2019 di Indonesia, polemik tentang upaya jauh keterlibatan sipil dan militer dimulai saat beberapa pembesar-pembesar TNI seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kasuspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi dan Inspektur Jenderal TNI Letnan Jenderal M. Herindra mengatakan bahwa TNI membutuhkan masuk dalam jabatan sipil di lembaga-lembaga sipil pemerintah, untuk menyelamatkan sekitar 500 orang perwira menengah pangkat Kolonel dan 150 orang perwira tinggi, yang saat ini tidak memegang jabatan sesuai pangkatnya. Keterlibatan militer dalam ranah sipil dianggap sebagai sebuah masalah tersendiri. Masalah sipil-militer adalah paradoks sederhana: institusi itu sendiri diciptakan untuk melindungi negara diberikan kekuatan yang cukup untuk menjadi ancaman bagi pemerintahan (Feaver, 1999).

Pernyataan tersebut menuai polemik di masyarakat sebab, tak terkecuali datang dari Letjen (Purn) Agud Widjojo yang menilai bahwa wacana tersebut berpotensi merusak sistem atau jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu kementerian/ lembaga negara (Situmorang, 2020). Artinya bahwa sampai hari ini, banyak beberapa kalangan menuntut untuk militer tetap menjunjung tinggi jiwa profesionalismenya. Sebab, mengurus negara jauh berbeda dengan mengurus peperangan

sehingga militer dituntut agar tidak terlibat jauh dalam proses pelibatannya ke dalam jabatan-jabatan sipil.

Relasi Sipil-Militer: Sebuah Refleksi

Pada tahun 1958 konsep “Jalan Tengah” yang diusulkan oleh Jenderal Ahmad Nasution kepada pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno saat peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang Jawa Tengah pada 13 November 1958. Konsep tersebut memberi peluang peranan terbatas militer dalam pemerintahan sipil. Memasuki gerbang Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto konsep tersebut diistilahkan menjadi Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Alih-alih Presiden Soeharto meracik konsep tersebut untuk digunakan menjadi pembenaran militer dalam meningkatkan pengaruhnya di pemerintahan. Militer secara kelembagaan dapat menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintahan. Jabatan strategis seperti; Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta masuk ke dalam parlemen melalui wadah Fraksi ABRI/TNI.

Supremasi sipil atas militer, sebagai salah satu ciri terlaksananya sebuah demokrasi yang sehat terbukti berulang kali mengalami berbagai ujian dan hambatan. Sejak awal mula terbentuknya pemerintahan Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia (Leni, 2013). Sehingga selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949) dengan mudah kita dapat menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Demikian jelas dan penting peranan politik tentara ketika itu sehingga sangat masuk akal apabila dikatakan bahwa karakteristik yang paling mencolok dalam masa itu adalah adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik (Said, 1991).

Tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang memiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri (*self created army*), artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Pemerintah pusat yang didominasi oleh generasi tua dibawah pimpinan Soekarno, berharap bisa mencapai kemerdekaan secara damai. Namun, Tentara Indonesia yang pada saat itu dimotori oleh para pemuda berpendapat lain dengan Sukarno, mereka kemudian berinisiatif untuk mempersenjatai diri dan mendirikan organisasi tentara sendiri, dengan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan tersebut (Said, 2001).

Dapat kita saksikan, pola strategi politik yang dimainkan oleh Soeharto telah berhasil mengubah sistem tata kelola pemerintahan begitu cepat. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dikerangkeng selama 32 tahun dalam sebuah rezim dengan dalih pembangunan (*development*). Kekuatan Dwifungsi ABRI secara perlahan-lahan dihapuskan menyusul runtuhnya rezim Soeharto, pada era Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur saat rapat pimpinan ABRI tahun 2000, disepakati untuk menghapus doktrin tersebut dan akan dimulai setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2004. Di era Gus Dur, ia sadar bahwa mengembalikan tupoksi TNI sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya adalah menjaga ketahanan dan keamanan negara tentu bukan sesuatu yang mudah (Muradi, 2005).

Meski secara konsepsi dwifungsi ABRI telah dihapus namun, tidak menutup kemungkinan praktik dan implementasinya akan tetap dilakukan oleh pihak militer. Hal yang pertama dilakukan oleh Gus Dur adalah mengevaluasi lembaga struktur negara dengan memisahkan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Yang menarik, Gus Dur mengakomodasi Polri dengan menempatkan jabatan sejajar dengan Panglima TNI, sehingga Polri tak lagi tersubordinasi di bawah TNI, karena fokus utama Gus Dur ialah mereposisi TNI tanpa menimbulkan gejolak. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004,

Indonesia dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga mantan Jenderal TNI. Saat itu, ia berkomitmen untuk melepas jabatannya di militer dan mendirikan Partai Demokrat serta menegaskan bahwa tentara sangat berbahaya jika masuk ke dalam politik praktis. Sehingga, selama masa jabatannya, isu-isu tentang Dwifungsi ABRI nyaris tak terdengar.

Keterlibatan Militer Dalam Jabatan Sipil

Isu keterlibatan militer jabatan sipil pada tahun 2019 kembali mencuat saat rapat pimpinan TNI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo saat Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan wacana yang ingin menambah pos jabatan baru bagi perwira tinggi di internal maupun di kementerian. Sontak pernyataan tersebut memunculkan silang pendapat di ranah publik, karena dianggap akan mengaktifkan kembali dwifungsi ABRI yang telah lama hilang pasca runtuhnya orde baru dan juga dianggap akan menciderai cita-cita reformasi. Wacana tersebut harus dicerna, dianalisis lalu kemudian ditindak. Wacana tersebut kembali mencuat seiring sejalan dengan peringatan pesta demokrasi pada tahun 2019.

Konsolidasi terkait soal sipil dan militer tentu menjadi sebuah keharusan dalam menatap era konsolidasi Indonesia beberapa tahun ke depan. Keterlibatan kelompok-kelompok sipil dan militer menjadi sangat penting untuk menjadi bentuk perhatian yang serius. Sebab, dari perspektif sejarah kemerdekaan Indonesia dua jabatan tersebut terlibat aktif. Ditambah dengan keterlibatan dua jabatan ini ke masalah kepemimpinan.

Wacana sipil dan militer akan menyentuh dua pokok bahasan yaitu sipil-militer dan militerisme. Wacana hubungan sipil dan militer muncul untuk mendapatkan penempatan hubungan yang paling tepat secara fungsional antara sipil dan militer, untuk mencegah munculnya militerisme. Agar mendapat pengertian yang tepat tentang wacana ini, pertama-tama perlu dipahami dulu hakikat pengertian hubungan sipil-militer. Hubungan sipil perlu dimengerti dalam kaitan pembagian kewenangan dan kekuasaan politiknya, khususnya dalam sistem politik yang demokratis. Demokrasi bertumpu pada kedaulatan rakyat, yang selanjutnya melalui pemilihan umum, rakyat menentukan pilihannya untuk menyelenggarakan kekuasaan menjalankan kekuasaan eksekutif, dan untuk bersama membuat undang-undang dan melaksanakan fungsi kontrol atas eksekutif pada kekuatan legislatif (Widjojo, 2015).

Wacana militer diperhadapkan dengan sipil, fenomena ini memang cenderung bias jika tidak dipahami betul arti dan makna dari konsep tersebut. Konsep ini memaksakan sebuah isu yang hadir dalam pola hubungan antara sipil dan militer yakni dwifungsi. Kajian dwifungsi diujicoba melalui kekuasaan dengan pola subjek (militer) dan objek (sipil). Spektrum yang berawal dari pemikiran yang berasal dari tataran lama dalam dwifungsi yang belum ditinggalkan sama sekali, sejalan dengan kenyataan belum tertatanya tataran baru pada era pasca dwifungsi. Mewakili tataran lama kita masih melihat konsep-konsep lama seperti keberadaan Fraksi ABRI/TNI di Dewan Perwakilan Rakyat, kemanunggalan TNI-Rakyat, konsep-konsep teritorial serta posisi TNI yang “memelihara keseimbangan dengan semua pihak” yang mengacu pada dwifungsi.

Pemerintah telah mengubah strategi-strategi represif ini melawan kekuatan-kekuatan oposisi yang bekerja dalam batas-batas status quo yang demokratis. Kebijakan-kebijakan ini mewakili upaya yang disengaja dan semakin sistematis untuk menghambat dan memperlemah oposisi sah yang penting bagi sistem demokrasi dengan menggunakan polisi dan militer sebagai instrumen kampanye (Power, 2018).

Akan tetapi, di sisi lain kita melihat sejak awal telah diperkenalkan konsep-konsep yang tidak terdapat dalam doktrin Dwifungsi, seperti antara lain: hubungan sipil-militer, supremasi sipil dan otoritas politik. Pada tahap awal ini konsep-konsep yang berdasarkan pada kaidah demokrasi dan memiliki relevansi dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan atau dengan TNI sebagai pelaksana fungsi utama pertahanan, mungkin belum diberikan artikulasi tentang implementasinya, namun secara

konsisten telah dikenalkan. Karena itu, kurun waktu yang merepresentasikan bahwa tahap pengenalan gagasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan dan TNI menjadi pelaksana utama fungsi pertahanan sebagai bagian dari praktik sistem politik yang demokratis (Agus Widjojo et al., 2015).

Pernyataan diatas ingin memperingatkan bahwa diruang-ruang publik hari ini masih banyak kekeliruan penafsiran tentang konsepsi militer apalagi jika disandingkan dengan dwifungsi. Kekaburan memahami konsepsi militer justru akan memasifkan kebencian ke kalangan militer. Namun, yang menjadi persoalan adalah metode mengartikulasikan relasi antara militer dan rakyat. Sejak awal telah diperkenalkan konsep konsep-konsep yang tidak terdapat dalam doktrin. Upaya reformasi TNI yang sudah berjalan selama dari dua dekade di Indonesia merupakan salah satu perwujudan agenda konsep *security sector reform*, yaitu sebuah konsep untuk membangun kembali sektor keamanan suatu negara agar sejalan dengan prinsip demokrasi, profesionalisme dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu dimensi yang ditekankan dalam konsep ini adalah penerapan kontrol sipil atas militer demi terwujudnya profesionalisme (Bhakti, 2009). *Security sector reform* sangatlah penting dalam menciptakan sistem *cek and balances*, seperti dalam penunjukkan panglima TNI, pengaturan anggaran hingga keputusan pengerahan kekuatan militer (Rabasa & Haseman, 2002).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diungkapkan bahwa terkait soal relasi sipil dan militer di Indonesia penulis membaginya ke dalam dua tipologi yaitu profesionalisme sipil-militer dan konsolidasi sipil-militer. Kedua tipologi relasi sipil-militer di Indonesia yang sampai hari ini masih berlaku. Sebab, pada tahun 2019 dibutuhkan relasi yang pro aktif dalam mengontrol kedua jabatan tersebut.

Meskipun sebenarnya relasi sipil-militer di Indonesia masih menemui beberapa kendala. Ketidaktegasan dan belum adanya kata sepakat antara pihak sipil-militer dalam menafsirkan konsep baku sipil-militer jelas akan berimplikasi pada model hubungan sipil-militer yang selanjutnya akan terjadi konflik kepentingan di antara sipil dan militer. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hubungan sipilmiliter umumnya terletak dari model dan uraian dari model-model tersebut dimana dibutuhkan harmonisasi dalam kesetaraan “proporsional” yang disepakati melalui otoritas sipil, dimana militer harus profesional di bidangnya dan partisipasi sipil turut serta dalam mengelola pertahanan serta bersama-sama membangun model hubungan sipil-militer yang harmonis di Indonesia guna kepentingan Indonesia di masa depan dan membangun Indonesia Baru dengan format demokrasi serta adanya pengakuan dan diakui oleh masyarakat internasional (Setiawan, 2013).

Apa yang diungkapkan oleh David Setiawan menguatkan perspektif penulis bahwa mendorong profesionalisme militer dan sipil tentu bisa menjadi sebuah konsesus dalam mengimplementasikan jabatan masing-masing. Di satu sisi, mendorong agar konsolidasi antar sipil-militer agar masif sehingga ketika muncul masalah di bangsa ini baik dari ketahanan nasional, masalah kemaritiman, keadilan, kesejahteraan dan lain-lain kedua jabatan ini mampu menjadi solusi (*problem solving*). Upaya untuk membangun format baru hubungan sipil-militer dalam masyarakat demokratis memerlukan landasan yang lebih fundamental. Prasyarat yang penting adalah terbentuknya pemerintahan demokratis yang mencakup *rule of law*, akuntabilitas publik dalam kaitan *delicate balance* tentang otonomi militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuatan, masalah pendidikan, dan doktrin militer. Dalam rangka mencari dan merumuskan hubungan baru sipil-militer yang harmonis harus ada kemauan dari semua komponen bangsa yang berlandaskan kepada nilai moral dan sikap mental yang saling menghormati dan menghargai (*mutual respect*) dan saling bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Baru berdasarkan prinsip yang ditetapkan sesuai otoritas pengambilan keputusan.

Keterlibatan lebih jauh kelompok-kelompok militer dalam jabatan sipil dianggap sebagai sebuah gerakan yang akan menciderai cita-cita reformasi. Pernyataan ini berangkat dari gagasan (Maniruzzaman, 1998) bahwa klasifikasi mundurnya militer dari politik terbagi menjadi lima

diantaranya, (1) kembali ke barak secara terjadwal dan terencana segera setelah dilangsungkan pemilihan umum; (2) kembali ke barak secara mendadak setelah menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil sementara; (3) kembali ke barak lewat revolusi sosial; (4) kembali ke barakan lewat pemberontakan massal dan (5) kembali ke barak karena invasi atau intervensi asing. Berdasarkan penjelasan tersebut, hal yang mungkin terjadi ketika disandingkan pada memontum tahun 2019 ada pada poin kedua, yaitu menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sipil. Setelah Susilo Bambang Yudhoyono yang berlatar belakang militer digantikan dengan Joko Widodo yang berlatar belakang sipil, tentunya memang harus mendorong bahwa milite harus kembali ke barak. Tidak terlalu jauh mencampuri urusan-urusan sipil. Sebab, masalah bangsa hari ini adalah ketidakadilan, kesenjangan sosial yang mestinya harus diselesaikan oleh kelompok-kelompok sipil.

Di sisi lain adalah mendorong profesionalisme militer. Adapun berdasarkan profesionalitasnya, (Maniruzzaman, 1998) membedakan (1) mundur secara profesional dan (2) mundur secara tidak profesional. Tentara profesional keluar dari dunia politik secara terencana dan penuh pertimbangan. Adapun tentara yang tidak profesional mundur dari politik secara mendadak dan tiba-tiba; biasanya beberapa kali terlibat dalam intervensi dan kembali ke barak hanya untuk menunda prospek demiliterisasi politik dalam jangka panjang. Proses mundurnya militer dari politik kerap kali tak terpisahkan dari fungsionalisasi atau refungsionalisasi peran militer. Oleh karena itu, gagasan fungsionalis dapat membantu memahami proses tersebut dengan lebih komprehensif. Dalam perspektif fungsionalis suatu masyarakat dilihat sebagai jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisasi menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut oleh sebagian besar masyarakat tersebut (Basuki, 2014).

Pada tahun 2019, keterlibatan militer dalam jabatan sipil masih dianggap bias, hal tersebut bercermin pada aturan tentang TNI Undang-undang nomor 34 tahun 2004 pasal 17 yang menyatakan bahwa:

1. Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas eprajuritan
2. Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, *Search and Rescue (SAR)* nasional, narkotika nasional dan mahkamah agung
3. Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah dan non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud

Undang-undang diatas terkesan bahwa bukan pada wilayah pihak militer berjalan secara konsisten aturan tersebut, tetapi malah ingin merevisi aturan tersebut dengan dalih penambahan pos-pos jabatan militer di dalam jabatan sipil. Menurut Inspektur Jenderal TNI Letnan M. Herindra bahwa Undang-undang TNI tersebut dilakukan revisi mengingat bahwa ada kementerian dan lembaga baru setelah Undang-undang itu dibentuk. Hal itu dilakukan agar TNI dapat menempati kementerian dan lembaga tersebut secara legal dan profesional. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa dalam fase perubahan suhu politik, militer dianggap terlibat dalam meniti jabatan-jabatan dalam pemerintahan sehingga ada upaya untuk pihak militer terlibat dalam menjalankan kerja-kerja sipil.

Hal itu dinilai akan memicu kembalinya Dwifungsi ABRI sebagaimana yang terjadi pada era Rezim Soeharto. Pemerintah mengklaim bahwa upaya tersebut bukan membangkitkan Dwifungsi tapi murni atas permintaan K/L. Pelibatan anggota militer dalam kelembagaan tersebut mereka tempatkan sebagai proses demokratisasi. Efek domino dari wacana ini berdampak pada dikeluarkannya Perpres 37/2019 dan wacana revisi UU TNI yang ujung-ujungnya menuai beragam kontroversi karena diyakini membuka keran peran militer di institusi sipil. Oleh sebagian pihak menilai lahirnya Perpres tersebut

justru mengakomodir adanya praktik bagi-bagi jabatan bagi Perwira Tinggi non job, sehingga menimbulkan “konflik, friksi, dan masalah baru”. Adanya keterlibatan militer di institusi sipil tentu saja berpotensi mengembalikan fungsi kekaryaan TNI yang dulunya berasal dari doktrin Dwifungsi ABRI. Sebagaimana diketahui bahwa doktrin Dwifungsi ABRI telah terhapus di awal masa Reformasi 98. Upaya pengembalian doktrin Dwifungsi ABRI jelas mencederai semangat Reformasi 1998 yang ingin mengembalikan serdadu ke barak dengan tujuan mengembalikan profesionalitas TNI sebagai aparat pertahanan Negara (Herny, 2020).

TNI membutuhkan masuk dalam jabatan sipil di lembaga sipil pemerintah, untuk menyelamatkan sekitar 500 perwira menengah pangkat Kolonel, dan 150 orang perwira tinggi, yang saat ini tidak memegang jabatan sesuai dengan pangkatnya (Situmorang et al., 2020). Selain polemik tersebut, ada juga beberapa kendala terkait permasalahan internal TNI itu sendiri. **Pertama**, permasalahan surplus perwira non-job merupakan permasalahan organisasi TNI secara internal yang membutuhkan penataan organisasi. **Kedua**, rencana tersebut telah mengesampingkan agenda reformasi TNI yang membatasi militer dari ranah sipil. **Ketiga**, upaya restrukturisasi belum diarahkan pada fungsi pertahanan negara dengan mempertimbangkan dinamika ancaman kontemporer (Fitri et al., 2019).

Tahun 2019 menjadi sebuah momentum untuk mendorong profesionalisme militer. Sebab, jika kelompok-kelompok militer terlibat jauh dalam ranah sipil khususnya dalam pengisian pos-pos jabatan sipil dianggap akan menciderai cita-cita reformasi. Hingga tahun 2019, penulis melihat bahwa dwifungsi militer yang telah lama hilang paca runtuhnya orde baru justru bertransformasi ke dalam multifungsi militer. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan-keberadaan kelompok militer di segala sektor misalnya ekonomi, politik, budaya hingga agama. Catatan penting yang harus ditulis ialah masyarakat harus bersatu padu serta mengevaluasi setiap keberadaan-keberadaan militer yang berujung pada tindakan-tindakan represif.

KESIMPULAN

Tahun 2019, masih terdapat permasalahan internal institusi militer itu. *Pertama*, terkesan masih ada upaya menghadirkan dwifungsi militer yang dianggap akan mencideri cita-cita reformasi sehingga didorong untuk membenahi penataan organisasi. *Kedua*, militer mestinya harus fokus pada masalah-masalah pertahanan dan keamanan negara yang sampai hari ini masih memunculkan masalah-masalah khususnya masalah teritorial batas kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah telah mencatat, bahwa relasi sipil dan militer ditengarai tak pernah usai, terutama dalam keterlibatan militer dalam jabatan sipil. Hal ini dianggap sebagai balas jasa sebagai konsekuensi sejarah yang turun temurun dari akar sejarah kebangsaan Indonesia, militer terlibat dalam proses peraihan kemerdekaan. Sehingga sampai detik ini militer akan selalu terlibat dalam jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penataan organisasi militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A.Y. (2014). Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat, *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 19(2), 136-166
- Bhakti. I.N. (2009). *Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar*. Jakarta: IDSPS Press.
- Budiman, H.G. (2018). Representasi Tentara dan Relasi Sipil-Militer Dalam Serial Patriot, *Patanjala Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 10(1), 115-130
- Crouch, H. (1999). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Erdianto, K. (2019). Rencana Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Dinilai Tak Sesuai Agenda Reformasi. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/>. Diakses 28 Maret 2020.
- Feaver, P. D. (1999). Civil-Military Relations, *Annu. Rev.Polit.Sci*, (2), 211-241
- Fitri, A. (2019). Rencana Penempatan Militer Aktif Dalam Jabatan Sipil dan Reformasi TNI, *Jurnal Info Singkat*, XI(04), 25-30
- Gunawan, A.B. (2017). Kontrol Sipil atas Militer dan Kebijakan Pertahanan di Indonesia Pasca Orde Baru, *Jurnal Politik*, 2(2), 198-230
- Herny. (2020). Menghadang Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Reformasi TNI. Retrieved from <http://mapcorner.wg.ugm.ac.id/2020/01/menghadang-kembalinya-dwifungsi-abri-melalui-reformasi-tni/>. Diakses tanggal 19 Juli 2020.
- Kardi, K. (2014). Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia. *MASYARAKAT Jurnal Sosiologi*, 19(2), 231-256
- Leni. N. (2013). Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik di Indonesia, *Jurnal TAPIs*, 9(1), 32-45
- Nawawi, H. (2019). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahdi. (1998). *Peran Sosial Politik ABRI Dalam Era Reformasi*. Jakarta: Departemen Keamanan RI dan Lemhanas.
- Maniruzzaman, T. (1998). *Militer Kembali ke Barak: Sebuah Studi Komparatif*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Miles & Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muradi. (2005). *BERPIJAK DI ATAS BARA Kegamangan Politik TNI Pada Masa Transisi*. Bandung: UNPAD Press.
- Rabasa., A & Haseman., J. (2002). *The Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics dan Power*. Santa Monica: RAND'S Publication.
- Said, S. (2001). *Tentara Nasional Indonesia Dalam Politik: Dulu, Sekarang dan Masa Datang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Said, S. (1991). *Genesis of Power, General Sudirman and The Indonesian Military in Politics: 1945-1949*. (Singapura dan Jakarta: ISEAS dan Pustaka Sinar Harapan.
- Sanit, A. (2003). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., Suyuti, H. (2013). Perkembangan Hubungan Sipil Dengan Militer di Indonesia, *Global & Policy*, 1(1), 74-83

- Situmorang, C.H. (2019). Polemik TNI Dalam Jabatan Sipil. Retrieved from <http://www.jurnalsocialsecurity.com/>, Diakses 3 April 2020.
- Syahrul, F. (2019). Kebijakan Penempatan Perwira TNI Dalam Jabatan Sipil. Retrieved from <https://makassar.tribunnews.com/>. Diakses tanggal 28 Maret 2020.
- Thomas P. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline, *Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 307-338
- Widjojo, A. (2015). *Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Zainal, N.A. (2013). Hubungan Sipil-Militer di Chile Pasca Augusto Pinochet, 1990-2006, *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 144-284